



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan limpahan rahmatNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara khususnya di wilayah Kabupaten Landak dalam upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkuat NKRI dan meningkatkan kehidupan demokrasi di daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan daerah, partisipasi politik dan pengembangan budaya politik.

Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan penghargaan yang diterima oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak pada tahun 2024 sebagai hasil pencapaian kinerja, yaitu sebagai berikut:

1. Penghargaan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas partisipasi aktif dan kerjasamanya dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih dalam rangka Menyemarakkan Hari Ulang Tahun Ke – 79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 31 Agustus 2024.

Dengan tulus kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih baik kritik, saran ataupun masukan yang membangun dalam menyelesaikan laporan kinerja tahunan ini. Harapan kami kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan khususnya bagi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak untuk selalu meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Ngabang, 25 Februari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Landak,



Samsul Bahri, S. Pd., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19721007 199802 1 004

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM	2
1. Pendahuluan	2
2. Susunan Organisasi	2
3. Tugas Pokok dan Fungsi	4
4. Sumber Daya Aparatur (SDA).....	5
5. Sumber Daya Keuangan.....	8
6. Sarana dan Prasarana	8
B. PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUED</i>) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK....	11
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	13
A. RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK.....	13
B. PERJANJIAN KINERJA	18
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. CAPAIAN KINERJA	23
B. REALISASI ANGGARAN	59
BAB IV : PENUTUP	66
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai upaya peningkatan dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab menuju terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maka diperlukan suatu bentuk pertanggungjawaban dalam bentuk laporan kinerja tahunan.

Laporan kinerja tahunan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 yang menyatakan visi, misi dan tujuan organisasi/intansi pemerintah dipertanggungjawabkan secara transparan dan dinilai berdasarkan tolak ukur Rencana Strategis.

Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan di dalam kegiatan Tahun Anggaran 2024 serta pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pertanggungjawaban dimaksud dilakukan melalui pengembangan sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban secara periodik dan melembaga sebagai salah satu persyaratan untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Landak.

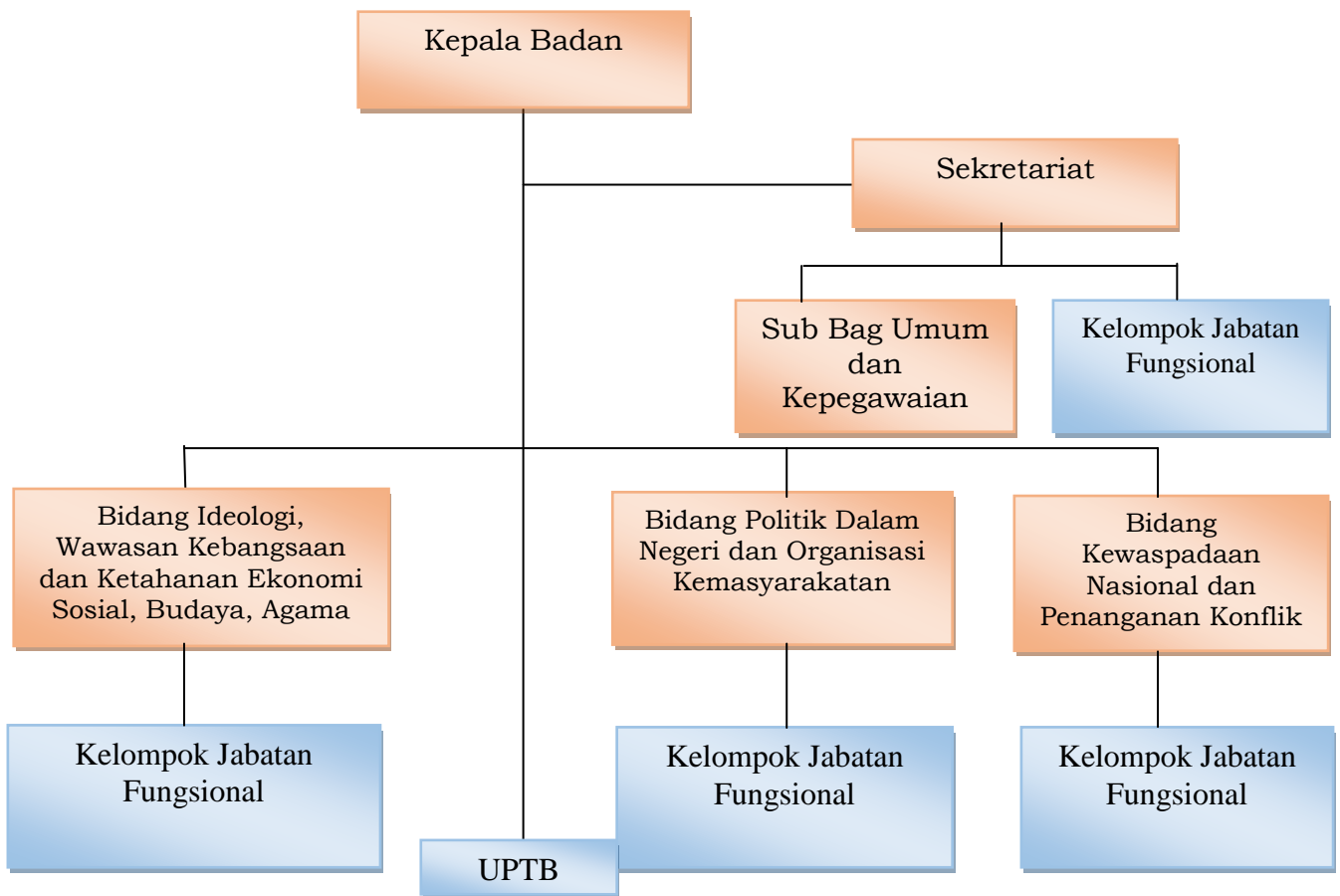
2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Landak Nomor 60 Tahun 2021 tanggal 16 September 2021, Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak terdiri dari:

- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretariat;
- 3) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya, Agama;
- 4) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
- 5) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
- 6) Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB);
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tanggal 16 September 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Landak



Sumber Data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak, Desember 2024.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Landak.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Landak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Landak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Landak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Landak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Landak;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Jumlah personil yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak per Desember 2024 berjumlah 20 (dua puluh) orang dengan susunan sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan

Eselon I	Berjumlah	0 (nol) orang
Eselon II	Berjumlah	1 (satu) orang
Eselon III	Berjumlah	2 (dua) orang
Eselon IV	Berjumlah	1 (satu) orang

Jabatan Fungsional	Berjumlah	4 (empat) orang
Staf non eselon	Berjumlah	7 (tujuh) orang
Pegawai Tidak Tetap	Berjumlah	3 (tiga) orang

Tabel 1.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

N O	ESELON/ NON ESELON	GOLONGAN																
		GOL. I				GOL. II				GOL. III				GOL. IV				JLH
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Eselon II															1		1
2	Eselon III													2	1			3
3	Eselon IV											1						1
4	Jabatan Fungsional									2	1	1						4
5	Staf non eselon				1			1	1	3	1							7
	JUMLAH				1			1	1	5	2	2		2	1	1		16

Sumber Data: Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak, Desember 2024.

Tabel 1.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Eselon/Non Eselon	Pendidikan						Golongan			
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Eselon II									1	1
2	Eselon III								2	1	3
3	Eselon IV								1		1
4	Jafung								2		2
5	Staf non eselon		1	3					3		7
6	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja								2		2
7	Pegawai Tidak Tetap	1		2							3
	JUMLAH	1	1	5					10	2	19

Sumber Data: Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak, Desember 2024.

Tabel 1.4.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin (Perempuan)

N O	ESELON/ NON ESELON	GOLONGAN																
		GOL. I				GOL. II				GOL. III				GOL. IV				JLH
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Eselon II																	
2	Eselon III																	
3	Eselon IV																	
4	Staf non eselon									1								1
5	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja									1								1
6	Pegawai Tidak Tetap																	2
	JUMLAH																	4

Sumber Data: Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak, Desember 2024.

Tabel 1.5.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin (Laki-Laki)

N O	ESELON/ NON ESELON	GOLONGAN																
		GOL. I				GOL. II				GOL. III				GOL. IV				JLH
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Eselon II															1		1
2	Eselon III													2				2
3	Eselon IV										1							1
4	Fungsional										1	2						3
5	Staf non eselon				1			1	1	3								6
6	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja									1								1
7	Pegawai Tidak Tetap																	1
	JUMLAH				1			1	1	4	2	2		2		1		15

Sumber Data: Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak, Desember 2024.

5. Sumber Daya Keuangan

Sumber dana untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan tahun Anggaran 2024, yaitu sebesar Rp 35.828.891.043,- (tiga puluh lima miliar delapan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah) yang meliputi anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai gaji dan tunjangan), Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal) dan Hibah.

6. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak menggunakan sarana dan prasarana inventaris barang. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, perlu didukung oleh aparatur pemerintah yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

- a. Gedung kantor yang dimanfaatkan untuk fasilitas ruang kerja dan ruang rapat, serta ruang tamu. Gedung Badan Kesatuan Bangsa dan politik kabupaten Landak berada di Jalan Pangeran Cinata, Ngabang, Kalimantan Barat.
- b. Layanan teknologi informasi berupa jaringan internet, yaitu Website, Instagram, Facebook dan E-Mail Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak.
- c. Kendaraan operasional baik untuk para Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV, serta kendaraan operasional Kantor baik Roda 4 maupun Roda 2.

Tabel 1.6.
Kendaraan Dinas Operasional Kantor

No	Unit Kendaraan	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
1.	Mobil Dinas	1 Unit	1	-	-
2	Motor Dinas	8 Unit	8	-	-

- d. Sarana dan prasarana penunjang lainnya yang tersedia di lingkungan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak sebagai berikut :

Tabel 1.7.
Sarana dan Prasarana Penunjang Lainnya

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
1	Rak Kayu	3		3	
2	Filling Cabinet Besi	2		2	
3	Camera Elektronik	1	1		
4	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 inci)	4			4
5	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 inci)	2			2
6	Mesin Hitung Manual	1			1
7	Lemari Besi/Metal	2			2
8	Lemari Besi/Metal	2			2
9	Lemari Besi/Metal	1			1
10	Rak Kayu	1			1
11	Rak Kayu	4			4
12	Filling Cabinet Besi	2			2

13	Brandkas	1			1
14	Brandkas	1			1
15	Meja Kerja Kayu	4			4
16	Sofa	4			4
17	Televisi	1			1
18	Camera Elektronik	1			1
19	Facsimile	1			1
20	Generator Set(Lab Set)	1			1
21	P.C Unit	1			1
22	P.C Unit	1			1
23	P.C Unit	1			1
24	P.C Unit	1			1
22	Lap Top	3			3
23	Lap Top	2			2
24	Lap Top	1			1
25	Lap Top	1			1
26	Note Book	1			1
27	Printer	1			1
28	Printer	5			5
29	Printer	1			1
30	Printer	1			1
31	P.C Unit	1			1
32	Generator Set(Lab Set)	1			1
33	Lemari Besi/Metal	2			2
34	Lemari Besi/Metal	1			1
35	Kursi Rapat	4			4

Sumber: Pengurus Barang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak, 2024.

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK

Beberapa permasalahan utama yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Landak adalah sebagai berikut:

1. Sistem politik yang belum sepenuhnya demokratis dan tingkat pendidikan politik yang belum merata;
2. Lunturnya pemahaman akan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di berbagai lapisan masyarakat yang dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa dan konflik sosial;
3. Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar kabupaten, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di wilayah Kabupaten Landak;
4. Masih rendahnya pemahaman tentang etika budaya politik dan demokrasi;
5. Teknologi informasi yang semakin canggih menyebabkan banyaknya berita-berita *hoax* beredar dimasyarakat;
6. Perlunya persiapan yang matang dalam pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digelar serentak pada Tahun 2024;
7. Perlunya peningkatan pembinaan terhadap generasi muda dan masyarakat dalam pendidikan politik dan wawasan kebangsaan;
8. Organisasi Masyarakat yang belum memahami tentang Undang-Undang Organisasi Masyarakat Nomor 16 tahun 2017 dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan dan Permendagri Nomor 58 Tahun 2017 tentang

Kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan/Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul kewenangan lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. Agar Rencana Strategis yang telah disusun ini dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak kedepan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap pegawai yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Indikasi Rencana Program empat tahun ke depan.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan responsif terhadap perkembangan situasi yang terjadi baik bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Guna merealisasikan dan mewujudkan Tujuan, dijabarkan dalam sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, kemudian, sasaran ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi, untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Landak dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis, dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja yang merupakan proses penyusunan rencana kinerja untuk suatu tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan pada awal setiap tahun anggaran, seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Selain itu, juga berisi informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijaksanaan, dan program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program, dan kegiatan beserta indikator kinerjanya, sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategisnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 merupakan implementasi Tahun pertama Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak periode tahun 2023 – 2026, sebagai tolok ukur pelaporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak. Adapun Rencana

Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak merupakan turunan dari Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Landak tahun 2023-2026.

Sebagai arahan bagi pelaksanaan setiap bidang/urusan pemerintahan, maka dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023-2026 ditetapkan tujuan-tujuan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan berkualitas.
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai.
3. Meningkatkan kontribusi sumber daya alam bagi perekonomian daerah.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dalam melaksanakan Programnya untuk mencapai Tujuan ke-5 dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Landak yaitu **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat**.

Sejalan dengan tujuan pembangunan yang ada, maka sasaran-sasaran pembangunan Kabupaten Landak Tahun 2023-2026 yang menjadi bagian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak adalah **Meniadakan Konflik Sosial**.

Untuk menjamin terselenggaranya sekaligus tercapainya target-target program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Landak, maka merupakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak sebagai lembaga yang memberikan pelayanan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik guna mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023-2026. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, program-program prioritas akan didampingi oleh program-program yang merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah

di atas. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dalam hal ini melaksanakan 5 (lima) Program Prioritas yaitu : 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, 3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan 5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial serta satu Program Penunjang yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

1. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak

Tujuan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Landak yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tujuan dan sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran telah dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Landak yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun melalui

serangkaian strategi. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran berdasarkan periode Rencana Strategisnya.

Adapun tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dalam proses penyelenggaraan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik untuk periode 2023-2026 mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pencegahan dan penanganan konflik

b. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Persentase Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
- b. Meningkatnya Pemahaman Politik Terhadap Elemen Masyarakat.
- c. Meningkatnya Persentase Pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan.
- d. Meningkatnya Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

c. Indikator Kinerja Utama

Untuk memenuhi tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai, berikut adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026, yaitu sebagai berikut:

- 1) Persentase potensi gangguan / konflik yang teratasi
- 2) Persentase pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
- 3) Persentase pemahaman terhadap politik, etika dan budaya politik
- 4) Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan
- 5) Persentase pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja atau kontrak kinerja adalah janji untuk melaksanakan amanat pencapaian kinerja yang harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja (JANKIN) memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Bupati Landak dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak telah mendatangi Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024. Untuk mendelegasikan tugas-tugas yang termuat didalam dokumen perjanjian kinerja tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak juga telah mendatangi dokumen perjanjian kinerja dengan pejabat eselon III, Eselon IV sampai ke tingkat jabatan pelaksana di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Landak, hal ini dilakukan agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih terarah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Adapun dokumen perjanjian kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Landak dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak pada tanggal 15 Januari 2024 sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan pencegahan dan penanganan konflik	Persentase potensi gangguan / konflik yang teratasi	100%
2.	Meningkatnya persentase pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan	Persentase pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan	87%
3.	Meningkatnya pemahaman politik terhadap elemen masyarakat	Persentase pemahaman terhadap politik, etika dan budaya politik	81%
4.	Meningkatnya persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan	91%
5.	Meningkatnya persentase pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	71%

Progam	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 2.220.204.772,00	APBD
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 870.474.600,00	APBD
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp 30.259.095.402,00	APBD
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 112.129.546,00	APBD
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp 240.740.000,00	APBD
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional	Rp 93.050.077,00	APBD

dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas
Penanganan Konflik Sosial

Total

Rp 33.795.694.397,00

Kemudian pada 11 November 2024 dokumen Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Landak dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Tahun 2024 diubah. Berikut Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Landak

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan pencegahan dan penanganan konflik	Persentase potensi gangguan / konflik yang teratasi	100%
2.	Meningkatnya persentase pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan	Persentase pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan	87%
3.	Meningkatnya pemahaman politik terhadap elemen masyarakat	Persentase pemahaman terhadap politik, etika dan budaya politik	81%
4.	Meningkatnya persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan	91%
5.	Meningkatnya persentase pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	71%

Progam	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 2.437.957.565,00	APBD
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 870.474.018,00	APBD
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp 31.803.242.837,00	APBD
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 119.652.346,00	APBD
5. Program Pembinaan dan Pengembangan	Rp 261.710.700,00	APBD

Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp	335.853.577,00	APBD
	Total	Rp	35.828.891.043,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak tahun 2024 ini dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Landak Tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

- ✓ Sangat Memuaskan (>100 persen)
- ✓ Memuaskan (capaian diatas 90 persen - 100 persen)
- ✓ Cukup memuaskan (capaian diatas 60 persen - 90 persen).
- ✓ Kurang memuaskan (capaian diatas 25 persen - 60 persen)
- ✓ Tidak memuaskan (\leq 25 persen)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak merupakan pertanggungjawaban Kepala Badan kepada Bupati atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki.

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak tahun 2024 merupakan pencapaian atas target yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang merupakan Rencana Strategis tahun Kedua dalam Renstra 2023-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak.

Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak telah melaksanakan 5 (lima) program prioritas dan 1 (satu) program penunjang untuk

mencapai 4 (empat) sasaran strategi dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Tahun 2023-2026.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan maka diketahuilah selisih atau celah kinerjanya. Selanjutnya dapat dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Adapun rumus yang digunakan untuk penghitungan persentase tingkat capaian kinerja sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Keterangan: Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran Strategi Badan Kesbangpol Landak dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran. Pengukuran dilakukan dari indikator tujuan, sasaran, kegiatan dan sub kegiatan.

Adapun rincian pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tujuan

Secara lebih rinci, pencapaian kinerja tujuan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Strategis Tahun 2024

TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatkan pencegahan dan penanganan konflik	Persentase potensi gangguan / konflik yang teratasi	100%	100%	100

Gangguan/ konflik adalah benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan karena adanya perbedaan kondisi, baik sosial budaya, nilai, status, dan kekuasaan dimana masing-masing pihak memiliki kepentingan terhadap sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Konflik yang dimaksud disini adalah konflik besar yang menyebabkan perpecahan di masyarakat Kabupaten Landak. Sepanjang tahun 2024 tidak ada kejadian konflik yang menyebabkan dampak perpecahan sehingga pencegahan dan penanganan konflik dapat dikatakan 100% berhasil. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama dengan Forum-Forum bentukan pemerintah kabupaten Landak seperti Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Koordinasi dan Komunikasi Organisasi Masyarakat (FORKOMAS), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) bekerja sama dengan TNI/POLRI, dan Badan Intelijen Daerah Pos Landak.

Tabel 3.2
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya persentase pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan	Persentase pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan	87%	97%	111

Meningkatnya pemahaman politik terhadap elemen masyarakat	Persentase pemahaman terhadap politik, etika dan budaya politik	81%	80%	99
Meningkatnya persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan	91%	100%	110
Meningkatnya persentase pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	71%	86,34%	122
Rata-Rata				111

Dari empat Indikator Kinerja Utama di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 100% telah memenuhi kriteria sangat memuaskan.

Indikator Kinerja Utama yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra Tahun 2023-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak sebanyak 4 (empat) indikator dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- ✓ Sangat memuaskan (capaian diatas 100 persen) sebanyak 3 (tiga) indikator.
- ✓ Memuaskan (capaian diatas 90 persen-100 persen) sebanyak 1 (satu) indikator.
- ✓ Cukup memuaskan (capaian diatas 60 persen - 90 persen) sebanyak 0 indikator.
- ✓ Kurang memuaskan (capaian diatas 25 persen - 60 persen) sebanyak 0 indikator.
- ✓ Tidak memuaskan (capaian 0 persen-25 persen) sebanyak 0 indikator.

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Hasil kinerja beserta evaluasi setiap sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Sasaran I : Meningkatnya persentase pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan

Secara rinci, pencapaian kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Sasaran I

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya persentase pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan	Persentase pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan	87%	97%	111

Upaya-upaya yang dilakukan untuk merealisasikan pencapaian sasaran tersebut adalah melalui pelaksanaan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan terlaksana dengan baik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak mendapat alokasi anggaran dalam APBD Pemerintah Kabupaten Landak Tahun 2024 untuk mencapai sasaran I ini sebesar Rp 870.474.018,- dengan realisasi Rp. 856.596.346,- atau 98,41%.

Upaya-upaya untuk merealisasikan pencapaian sasaran I melalui satu program, 1 (satu) kegiatan, 4 (empat) sub kegiatan terlaksana dengan baik.

Realisasi fisik kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 3.4
Program dan Kegiatan Sasaran I

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah Desa Berkarakter Pancasila	11 Desa	12 Desa	109%
		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase cakupan keberhasilan kegiatan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100%
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Kebijakan	1 Kebijakan	100%
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan	74 Orang	724 Orang	978,38 %

		Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	60	50	83,33%

Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada program ini yaitu:

1. Program/kegiatan Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih (Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih secara Simbolis di Kabupaten Landak Tahun 2024 pada tanggal 2 Agustus 2024) dan Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih di Kabupaten Landak Tahun 2024.
2. Sosialisasi dan Pembentukan Desa dan Sekolah Berkarakter Pancasila di Wilayah Kecamatan Jelimpo yang dilaksanakan di Kecamatan Jelimpo pada tanggal 26 September 2024 dengan peserta sebanyak 50 orang.
3. Deklarasi Pilkada Damai dengan tema “Merawat Kebhinekaan Menyongsong Pilkada Serentak yang Damai Tahun 2024”.
4. Peringatan Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2024 dengan mengikuti upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang dilaksanakan di lapangan kantor Bupati Landak.
5. Peringatan Hari Bela Negara pada tanggal 19 Desember 2024 dengan pelaksanaan upacara Peringatan Hari Bela Negara Tahun 2024 yang dilaksanakan di di lapangan kantor Bupati Landak peserta upacara berasal dari ASN dan PTT Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.

6. Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Tahun 2024 dengan peserta yang ikut seleksi sebanyak 256 orang dan lolos seleksi administrasi 203 orang.
7. Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Tahun 2024 di kabupaten Landak dengan jumlah putra 18 orang dan putri 12 orang serta yang dikirim dan lolos di provinsi Kalimantan Barat sebanyak 3 orang yang terdiri dari 2 putra dan 1 putri.
8. Monitoring Desa Berkarakter Pancasila.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Tahun 2024 beserta analisisnya akan dibahas sebagai berikut:

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pada pencapaian sasaran strategis meningkatnya persentase pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan pada tahun 2024 yaitu mencapai 111%. Hal ini disebabkan tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnya bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

a. Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jika sebuah instansi tidak mencapai tingkat efisiensi yang rendah, maka bisa dikatakan adanya pemborosan dalam menggunakan dana anggaran untuk belanja.

Penghitungan Tingkat Efisiensi :

- Jika %capaian Kinerja < 100% maka % capaian kinerja - %penyerapan anggaran.
- Jika % capaian kinerja ≥ 100% maka 100% - %penyerapan anggaran.

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya persentase pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	870.474.018	856.596.346	98,41	111	1,59

Sumber Data : Realisasi Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak

Dari Tabel di atas dapat dilihat persentase realisasi anggaran sebesar 98,41% dan realisasi capaian kinerja sebesar 111% dan tingkat efesiensinya sumber daya sebesar 1,59%. Hal ini menunjukkan hasil yang baik dimana semakin rendah tingkat efisiensi maka semakin baik dalam pengelolaan anggarannya.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada sasaran strategis meningkatnya persentase pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan didukung oleh Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan telah terlaksana dengan baik dengan pencapaian kinerja 111% melebihi target yang ditentukan yaitu 87% dengan realisasi 97%.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2023 capaian kinerja indikator persentase pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan tercapai 105% mengalami peningkatan ditahun 2024 yaitu 111%. Hal tersebut berarti menunjukkan adanya peningkatan realisasi kinerja 10% dari tahun sebelumnya. Sedangkan ditahun 2022 belum ada pengukuran terkait indikator tersebut.

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			TARGET 2024
		2022	2023	2024	
Meningkatnya persentase pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan	Persentase pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan	-	90%	97%	87%

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPD

Untuk pencapaian Rencana Pembangunan Daerah, target pencapaian indikator persentase pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan 87% tercapai 97% telah melampaui target yang ditetapkan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Secara standar nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak tidak memiliki ketentuan standar nasional untuk dijadikan pembanding antara realisasi kinerja tahun ini.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan :

Penyebab keberhasilan dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- a. Mendatangkan pemateri yang berkompeten dibidangnya sehingga ketika melaksanakan pre test dan post test para responden dapat memahami apa yang telah disampaikan.
- b. Koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait antara lain seperti instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan.
- c. Masing-masing bidang membuat rencana kegiatan dan kartu kendali sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan pencairan anggaran dapat terkendali dengan baik.
- d. Koordinasi yang baik antar unit kerja didalam dengan membentuk jaringan perencanaan perbidang, sehingga bisa dilaksanakan dan direalisasikan oleh setiap bidang yang bersangkutan.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- a. Kurangnya anggaran, Sumber Daya Manusia, sarana pendukung dan fasilitas kerja serta gedung kantor belum memadai dibidang wawasan

kebangsaan maupun badan Kesbangpol Kab. Landak masih sangat terbatas.

- b. Materi yang disampaikan kepada kepala sekolah melalui sosialisasi terkait teknis pendaftaran Capaska di aplikasi tidak diteruskan kepada Pembina paskibra.
- c. Peserta yang diikutsertakan dalam sosialisasi desa berkarakter pancasila masih terbatas karena menyesuaikan anggaran yang tersedia.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- a. Melaksanakan sosialisasi perekrutan calon paskibra dengan fokus undangan guru pembina paskibra di sekolah.
- b. Melibatkan semua pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak untuk bekerja sama dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
- c. Pemanfaatan waktu yang tepat agar semua pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan dan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait;
- d. Mengoptimalkan anggaran yang ada dengan mengutamakan kegiatan-kegiatan prioritas dan memanfaatkan media yang ada untuk dapat berinovasi seperti pemasangan baliho dan media sosial.

Sasaran II : Meningkatnya pemahaman politik terhadap elemen masyarakat

Secara rinci, pencapaian kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Sasaran II

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya pemahaman politik terhadap elemen masyarakat	Persentase pemahaman terhadap politik, etika dan budaya politik	81%	80%	99

Upaya-upaya yang dilakukan untuk merealisasikan pencapaian sasaran II adalah melalui pelaksanaan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan 1 (satu) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan terlaksana dengan baik. Hibah-hibah dapat tersalurkan 100% dan tepat waktu.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak mendapat alokasi anggaran dalam APBD Pemerintah Kabupaten Landak Tahun 2024 untuk mencapai sasaran II ini sebesar Rp. 31.803.242.837,- dengan realisasi Rp. 31.800.746.214,- atau 99,99%.

Realisasi fisik kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 3.8
Program dan Kegiatan Sasaran II

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terumuskannya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan	Persentase cakupan keberhasilan kegiatan terkait Kebijakan Teknis dan	100%	100%	100%

	Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
2.	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	3 dokumen	3 dokumen	100%
3.	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	100 orang	700 orang	700%

	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
4.	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300 orang	300 orang	100%
5.	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 laporan	1 laporan	100%

	Politik di Daerah				
--	-------------------	--	--	--	--

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan indikator Persentase partai politik penerima bantuan keuangan partai politik dengan kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan Kriteria yang berlaku target 100% realisasi 100%.

Program kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran politik bagi pemilih pemula dengan melakukan sosialisasi pendidikan politik, koordinasi terkait politik, monitoring situasi politik daerah dan anggaran hibah.

Adapun bentuk pelaksanaan kegiatan berupa :

1. Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Ngabang pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan peserta 100 orang terdiri dari siswa siswi SMA Negeri 2 Ngabang.
2. Rapat Koordinasi Deklarasi Netralitas ASN dalam Pilkada 2024 Kabupaten Landak pada Kamis 04 Juli 2024 dikantor Kesbangpol Landak.
3. Deklarasi Damai dukung Pilkada Damai 2024 yang dilaksanakan oleh Forum Pembauran Kebangsaan pada tanggal 18 September 2024.
4. Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
5. Belanja Hibah Uang kepada KPU, Bawaslu, TNI dan Polri.
6. Monitoring tahapan pilkada tahun 2024.
7. Himbauan Pilkada damai bersama forkopimda di setiap kecamatan dan desa

Bentuk fasilitasi kegiatan diluar program Poldagri, seperti:

1. Rapat koordinasi pilkada serentak tahun 2024 bersama Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Landak;
2. Rapat koordinasi pilkada serentak bersama Forkopimda Kabupaten Landak;
3. Doa bersama pilkada damai lintas agama.
4. Dialog Publik “mewujudkan demokrasi damai dan harmoni sosial” di Kabupaten Landak;

Sosialisasi Pendidikan politik Tahun 2023 dilaksanakan di 7(tujuh) Sekolah total berjumlah 560 orang, Tahun 2022 dilaksanakan di 6 (enam) sekolah total peserta 600 peserta. Semua hibah dapat tersalurkan 100% dari tahun ke tahun.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Tahun 2024 beserta analisisnya akan dibahas sebagai berikut:

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pada pencapaian sasaran strategis meningkatnya pemahaman politik terhadap elemen masyarakat pada tahun 2024 yaitu mencapai 99% sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena responden kurang memahami apa yang telah disampaikan oleh pemateri. Namun hal tersebut tidak terlalu berdampak signifikan.

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penghitungan Tingkat Efisiensi :

- Jika %capaian Kinerja<100% maka % capaian kinerja - %penyerapan anggaran.
- Jika% capaian kinerja>= 100% maka 100% - % penyerapan anggaran.

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya pemahaman politik terhadap elemen masyarakat	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	31.803.242.837	31.800.746.214	99,99	99	0,01

Perbandingan antara persentase realisasi anggaran 99,99% dan realisasi capaian kinerja 99% maka tingkat efisiensi sumber daya sebesar 0,01%.

Persentase efesiensi ini secara teori sudah baik sehingga pada tahun 2024 terdapat efesiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya.

b. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada sasaran strategis meningkatnya pemahaman politik terhadap elemen masyarakat didukung oleh Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik telah terlaksana dengan baik dengan tingkat pencapaian kinerja 99 % yaitu mengalami penurunan dimana target yang ditentukan yaitu 81% dengan realisasi 80%. Penurunan terjadi karena kegiatan pada program ini lebih banyak peruntukkannya pada hibah daripada kegiatan yang mendukung kinerja. Namun tingkat ketercapaian pada level program sangat baik yaitu 100%.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2023 capaian kinerja indikator persentase pemahaman terhadap politik, etika dan budaya politik tercapai 100%. Sedangkan ditahun sebelumnya belum ada pengukuran terkait indikator tersebut.

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			TARGET 2024
		2022	2023	2024	
Meningkatnya pemahaman politik terhadap elemen masyarakat	Persentase pemahaman terhadap politik, etika dan budaya politik	-	80%	80%	81%

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPD

Untuk pencapaian RPD, target pencapaian indikator persentase pemahaman Persentase pemahaman terhadap politik, etika dan budaya politik 81% tercapai 80% kurang 1% dari target yang ditetapkan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Secara standar nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak tidak memiliki ketentuan standar nasional untuk dijadikan pembandingan antara realisasi kinerja tahun ini.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan :

Penyebab keberhasilan dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- a. Mendatangkan pemateri yang berkompeten dibidangnya sehingga ketika melaksanakan pre test dan post test para responden dapat memahami apa yang telah disampaikan.
- b. Terciptanya koordinasi yang baik dengan semua stakeholder terkait dengan demokrasi antara lain Organisasi masyarakat, Partai Politik, Pihak sekolah dan Media.
- c. Dengan gencarnya sosialisasi dan pendidikan politik kepada Pemilih pemula sehingga bisa menggugah mereka untuk menyalurkan hak politiknya pada gelaran pemilihan serentak tahun 2024.
- d. Tersalurnya bantuan keuangan partai politik sehingga dapat membuat kegiatan Pendidikan politik dan pembinaan kepada masyarakat.
- e. Tersalurnya Hibah pemilihan kepala daerah kepada KPU, BAWASLU, TNI dan POLRI tepat waktu.
- f. Melaksanakan rapat koordinasi terkait Pendidikan politik Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini.

- g. Melaksanakan rapat koordinasi dengan KPU, BAWASLU, TNI dan POLRI terkait penyaluran dana hibah pemilihan.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- a. Kurangnya anggaran, SDM, sarana pendukung dan fasilitas kerja serta gedung kantor belum memadai dibidang poldagri dan ormas maupun badan Kesbangpol Kab. Landak masig sangat terbatas.
- b. Tingkat pendidikan politik yang belum merata perlu adanya pembinaan pendidikan politik guna memberikan pemahaman politik.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- a. Evaluasi materi yang disampaikan dengan pre test dan post test yang disampaikan.
- b. Masing-masing bidang membuat rencana kegiatan dan kartu kendali sehingga kegiatan berjalan sesuai rencana dan pencairan anggaran dapat terkendali dengan baik.
- c. Melaksanakan monitoring pendistribusian logistik, pelaksanaan pemilihan dan penghitungan suara.
- d. Melakukan Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan semua pihak / stakeholder dalam mewujudkan pesta demokrasi yang berintegritas dan berjalan sesuai asas luber jurdil di Kabupaten Landak.
- e. Melibatkan semua pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak untuk bekerja sama dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

Sasaran III : Meningkatnya persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan

Secara rinci, pencapaian kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Sasaran III

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan	91%	100%	110

Upaya-upaya yang dilakukan untuk merealisasikan pencapaian sasaran III adalah melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan 1 (satu) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan terlaksana dengan baik.

Untuk mencapai sasaran III ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak mendapat alokasi anggaran dalam APBD Pemerintah Kabupaten Landak Tahun 2024 sebesar Rp. 119.652.346,- dengan realisasi Rp. 119.377.600,- atau 99,77%.

Realisasi fisik kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12
Program dan Kegiatan Sasaran III

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Ormas dan LSM yang aktif yang aktif	91	100	76,52

		Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase cakupan keberhasilan kegiatan Kebijakan Teknis dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100%
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1	1	100
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1	1	100
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	70	80	114,29
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	15	15	100

		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1	1	100
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	-----

Bentuk pelaksanaan kegiatan pada program ini antara lain:

- a) Pendataan Ormas dan Penyusunan Database ORMAS.
- b) Gerakan Kemitraan Bersama Organisasi Kemasyarakatan Sipil dan Perguruan Tinggi dalam rangka Mensukseskan Pemilu Serentak Tahun 2024.
- c) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
- d) Pembinaan Organisasi Masyarakat berjumlah 115 ormas.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pada pencapaian sasaran strategis Meningkatnya pemahaman politik terhadap elemen masyarakat pada tahun 2024 yaitu mencapai 110%. Hal ini disebabkan tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnya bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penghitungan Tingkat Efisiensi :

- Jika %capaian Kinerja<100% maka % capaian kinerja - %penyerapan anggaran.
- Jika% capaian kinerja>= 100% maka 100% - %penyerapan anggaran.

Tabel 3.13
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	119.652.346	119.377.600	99,77	110	0,23

Perbandingan antara persentase realisasi anggaran sebesar 99,77% dan realisasi capaian kinerja 110%, maka tingkat efisiensi sumber dayanya sebesar 10,23%. Persentase efisiensi ini secara teori sudah baik sehingga pada tahun 2024 terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya.

b. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada sasaran strategis meningkatnya persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan didukung oleh Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan telah terlaksana dengan baik dengan tingkat pencapaian kinerja 100% yaitu diatas target yang ditentukan dimana target yang ditentukan yaitu 91% dengan realisasi 100%. Sebanyak 115 ormas yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak, mendapat pembinaan melalui sosialisasi dan pembinaan secara langsung dengan bertemu dengan pengurus ormasnya maupun melalui kontak telpon.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2023 capaian kinerja indikator persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan tercapai 90%. Sedangkan ditahun 2022 belum ada pengukuran terkait indikator tersebut.

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			TARGET 2024
		2022	2023	2024	
Meningkatnya persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan	-	90%	100%	91%

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPD

Untuk pencapaian RPD, target pencapaian indikator persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan sebesar 91% tercapai 100% melampaui target yang ditetapkan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Secara standar nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak tidak memiliki ketentuan standar nasional untuk dijadikan pembanding antara realisasi kinerja tahun ini.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan :

Penyebab keberhasilan dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- Terbentuknya Tim Terpadu Pengawasan Ormas di Kabupaten Landak;
- Terjaganya harmonisasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Organisasi Masyarakat yang ada di Kabupaten Landak melalui pembinaan Organisasi Masyarakat;

- c. Terasilitasinya kegiatan Organisasi Masyarakat oleh Badan Kesbangpol Landak;
- d. Monitoring dan evaluasi Organisasi Masyarakat;

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- a. Masih terdapat Organisasi Masyarakat yang belum memahami peraturan perundang-undangan ormas.
- b. Ormas yang berdomisili dikecamatan kurang berkoordinasi dengan pihak kecamatan, desa, sampai ke tokoh masyarakat setempat.
- c. Kurangnya dukungan anggaran pada Organisasi Masyarakat yang sudah terdaftar di Kesbangpol Landak.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- a. Membentuk Forum Organisasi Masyarakat yang bertujuan mengakomodir kebutuhan anggaran ormas di Pemerintah Daerah Kabupaten Landak.
- b. Melakukan sosialisasi Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat kepada pengurus Organisasi Masyarakat yang melibatkan forum Organisasi Masyarakat.
- c. Melakukan pembinaan terus menerus kepada Organisasi Masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

Sasaran IV : Meningkatnya persentase pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya

Secara rinci, pencapaian kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.15
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Sasaran IV

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya persentase pembinaan	Persentase pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	71%	86,34%	122

ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya				
---------------------------------------	--	--	--	--

Upaya-upaya yang dilakukan untuk merealisasikan pencapaian sasaran IV adalah melalui pelaksanaan 3 (tiga) Program yaitu : 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, 2) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial, 3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk pencapaian sasaran IV ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak mendapat alokasi anggaran pada 3 (tiga) program tersebut diatas sebesar Rp. 3.035.521.842,- dengan realisasi Rp. 2.908.331.086,- atau 99,89%.

Realisasi fisik kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran IV pada (tiga) program dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.16
Program dan Kegiatan Sasaran IV

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)
1.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Persentase penanganan kasus kerawanan bidang ekonomi, sosial dan budaya	100%	100%	100
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase cakupan keberhasilan kegiatan terkait Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	100%	100
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan	1	1	100

		Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun			
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	260	35	13,46
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	37	50	135,14
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		Persentase realisasi kinerja Rencana Aksi Daerah (RAD) penanganan konflik daerah	100	100	100

		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase cakupan keberhasilan terkait kebijakan teknis dan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100%	100%	100
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1	1	100
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1	1	100
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	80	79	98,75

		Daerah	Penanganan Konflik di Daerah			
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	37	87	235,14
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12	10	83,33
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dok	3 Dok	100
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN		Persentase Unit Kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	98%	100%	100
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra-PD, Renja-PD, RKA-SKPD, LAKIP-PD	3 Dok	3 Dok	100
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	100
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	1	100

			Dokumen RKA-SKPD			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	2	2	100
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	100
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan administrasi Kepegawaian	1	1	100
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	5	83,33
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	2	200
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	2	200
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	100
		Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77	95	123,38
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	1	1	100
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	7	7	100

		Lainnya	Lainnya yang Disediakan			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	100
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Operasional dan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100	38,46	38,46
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	11	9	81,82
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	8	53,33

Adapun bentuk pelaksanaan kegiatan pada **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** antara lain:

1. Rapat Pembahasan tentang Kajian Akademik Pengusulan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Landak.
2. FKUB Landak Imbau Warga Untuk Sukseskan Pilkada Damai 2024.
3. Peresmian Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Landak pada 12 September 2024.
4. Penyaluran hibah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
5. Melakukan pengawasan pasar bersama dinas terkait.
6. Anggota Tim pengendali inflasi daerah Kabupaten Landak

Adapun bentuk pelaksanaan kegiatan pada **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial** antara lain:

1. Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Landak Tahun 2024 pada tanggal 13 Juni 2024 di aula Kecil Kantor Bupati Landak dengan peserta perwakilan setiap Organisasi Perangkat Daerah

di Kabupaten Landak;

2. Penyusunan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Landak Tahun 2024;
3. Rapat Koordinasi Kabupaten dan Pengambilan Kebijakan Para Pimpinan;
4. Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan yang dilaksanakan dibulan November 2024;
5. Rapat Kerja Forkopimda Tahun 2024 pada tanggal 4 Juli 2024 dengan peserta seluruh anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Landak;
6. Menghimpun dan tukar informasi terkait hal-hal yang mengemuka di kabupaten yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di Daerah;
7. Hibah Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah pada triwulan IV Tahun 2024.

Rapat Koordinasi /Kerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Landak dan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dapat terlaksana tanpa ada hambatan. Kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan. Tim ini memiliki peran penting dalam mendeteksi segala informasi yang diterima dari masyarakat.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pada pencapaian sasaran strategis meningkatnya persentase pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya pada tahun 2024 yaitu mencapai 122%. Hal ini disebabkan tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnya bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penghitungan Tingkat Efisiensi:

- Jika %capaian Kinerja<100% maka % capaian kinerja - % penyerapan anggaran.

- Jika % capaian kinerja $\geq 100\%$ maka $100\% - \% \text{ penyerapan anggaran}$.

Tabel 3.17
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya persentase pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	261.710.700	261.429.500	95,81	122	2,37
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	335.853.577	328.841.484			
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.437.957.565	2.318.060.102			
	Rata-Rata				95,81	122	4,19

Perbandingan antara persentase realisasi anggaran sebesar 95,81% dan realisasi capaian kinerja 112%, maka tingkat efisiensi sumberdayanya sebesar 4,19%. Persentase efisiensi ini secara teori sudah baik sehingga pada tahun 2024 terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya.

e. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada sasaran strategis Meningkatkan persentase pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya didukung melalui pelaksanaan 3 (tiga) Program yaitu : 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, 2) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik

Sosial, 3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah terlaksana dengan baik dengan tingkat pencapaian kinerja 122% yaitu diatas target yang ditentukan dimana target yang ditentukan yaitu 71% dengan realisasi 86,34%.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2024 capaian kinerja indikator persentase pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya tercapai 86,34%. Sedangkan ditahun 2023 capaian kinerja indikator persentase pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya tercapai 71%.

Tabel 3.18
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			TARGET 2024
		2022	2023	2024	
Meningkatnya persentase pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	-	70%	86,34%	71%

6. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPD

Untuk pencapaian RPD, target pencapaian indikator persentase pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya sebesar 71% tercapai 86,34% melampaui target yang ditetapkan dengan tingkat ketercapaian 112%.

7. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Secara standar nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak tidak memiliki ketentuan standar nasional untuk dijadikan pembanding antara realisasi kinerja tahun ini.

8. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan :

Faktor pendorong dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Terjalannya koordinasi Komunitas Intelijen Daerah/ Tim Kewaspadaan Dini Daerah (TKDD) dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA).
2. Forum-forum yang dibentuk oleh pemerintah seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Koordinasi dan Komunikasi Organisasi Masyarakat (FORKOMAS), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) kabupaten dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kecamatan telah menjalankan fungsinya dengan baik di lingkungan masyarakat.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Adanya Jamaah Ahmadiyah di Desa Sompak, Kecamatan Sompak dan Desa Andeng, Kecamatan Sengah Temila. Mereka mengaku penganut agama Islam namun tidak sesuai ajaran Islam. Ahmadiyah menganggap ada nabi setelah Nabi Muhammad. Sosok yang diyakini Ahmadiyah sebagai nabi penerus setelah Nabi Muhammad SAW adalah Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah.
2. Adanya Aliran Saksi Yehova di Desa Paloan, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak. Aliran ini tidak memperbolehkan memberi hormat kepada Bendera Sang Saka Merah Putih karena menurut aliran tersebut memberi hormat hanya kepada Tuhan yang mereka percaya. Selain itu juga mereka tidak mengakui bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan dan Juru Selamat seperti yang tertulis dalam Kitab Injil Kristus. Mereka juga tidak mengakui bahwa tanggal 25 Desember adalah hari lahirnya Yesus Kristus sehingga tidak merayakan Hari Natal.

3. Adanya Kelompok Penginjilan Tunas Daud di Wilayah Banyuke dan Ngabang, Kabupaten Landak. Aliran ini tidak sesuai ajaran kekristenan. Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa mengajar bahwa wanita Cina (Yang Xiangbin) adalah Kristus Akhir Zaman dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jika mereka berbuat hal-hal buruk dan jahat, ketika mereka bereinkarnasi, mereka bisa tetap menjadi manusia atau menjadi binatang. Mereka tidak perlu lagi menikah, mereka bebas berhubungan intim dengan siapa pun. Menurut mereka menikah adalah ajaran manusia, sudah seharusnya ditinggalkan karena sudah usang. Belum memadainya dukungan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak.
4. Masih terdapat kasus narkoba di kabupaten Landak.
5. Masih ada konflik/ sengketa yang terjadi terutama pada perkebunan kelapa sawit. Namun konflik/permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan dan tidak berpengaruh signifikan pada kehidupan masyarakat di Landak.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- a. Melakukan monitoring dan pendekatan terhadap beberapa aliran yang dianggap tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.
- b. Tim pakem menindaklanjuti hasil monitoring terhadap aliran-aliran yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.
- c. Melaksanakan pertemuan/rapat dengan anggota FKUB, FPK dan lain-lain dalam menciptakan kerukunan.
- d. Melakukan kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi, Polisi dan tokoh masyarakat dalam penanganan masalah Narkoba.
- e. Terciptanya koordinasi yang baik dengan semua stakeholder antara lain dengan anggota FORKOPIMDA, TNI, POLRI, dan KOMINDA.

- f. Melaksanakan rapat FORKOPIMDA dan KOMINDA.
- g. Mengoptimalkan anggaran yang ada dengan mengutamakan kegiatan-kegiatan prioritas dan memanfaatkan media yang ada untuk dapat berinovasi.

Dari kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak, secara keseluruhan tidak mengalami hambatan atau masalah yang substansional. Masalah yang dirasakan berupa anggaran yang terbatas, sehingga kegiatan yang direncanakan pada Rencana Strategis dan Rencana kerja tidak sepenuhnya dapat diakomodir sehingga menyebabkan tidak tercapainya kinerja kegiatan yang ditargetkan. Namun demikian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak memaksimalkan anggaran yang ada untuk kegiatan prioritas.

B. REALISASI ANGGARAN

Tahun 2024 total anggaran belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Rp 35.828.891.043,- (Tiga Puluh Lima Miliar Delapan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah) yang meliputi anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai gaji dan tunjangan) dan Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal) dan Hibah dengan realisasi atau serapan tahun ini adalah Rp 35.685.051.246,- (Tiga Puluh Lima Miliar enam ratus delapan puluh lima juta lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) atau (99,60%).

Alokasi dan realisasi anggaran untuk program prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19
Realisasi Anggaran Program Prioritas

N O	PROGRAM	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	870.474.018	856.596.346	98,41
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	870.474.018	856.596.346	98,41
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	11.943.300	11.864.750	99,34
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50.000.000	50.000.000	100,00
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	775.590.300	762.300.476	98,29
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	32.940.418	32.431.120	98,45
2.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	31.803.242.837	31.800.746.214	99,99
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	31.803.242.837	31.800.746.214	99,99
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	6.112.100	6.110.600	99,98

		Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	31.717.365.502	31.717.363.217	100,00
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.002.600	2.002.000	99,97
		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	77.121.835	74.633.097	96,77
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	640.800	637.300	99,45
3.		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	119.652.346	119.377.600	99,77
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	119.652.346	119.377.600	99,77
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3.711.600	3.706.100	99,85
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3.820.400	3.815.300	99,87

		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	98.450.800	98.193.400	99,74
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	7.524.000	7.522.400	99,98
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	6.145.546	6.140.400	99,92
4.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	261.710.700	261.429.500	99,89
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	261.710.700	261.429.500	99,89
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	230.000.000	230.000.000	100,00
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20.970.700	20.970.700	100,00
5.		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	335.853.577	328.841.484	97,91
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	335.853.577	328.841.484	97,91
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5.652.100	5.613.100	99,31

		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	205.788.900	205.770.100	99,99
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	9.084.600	8.710.134	95,88
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	59.211.300	58.898.400	99,47
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	23.924.577	23.680.900	98,98
		TOTAL	33.390.933.478	33.366.991.144	99,93

Sumber: RFK Tahun Anggaran 2024 TW IV Badan Kesbangpol Landak.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa anggaran program prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak tahun 2024 yang tersedia sebesar Rp 33.390.933.478,- (tiga puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) terdiri dari kegiatan dan hibah, terealisasi sebesar Rp 33.366.991.144,- (tiga puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah) terdapat selisih Rp 23.942.334,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) atau 99,93%. Dengan anggaran tersebut diatas digunakan dengan semaksimal mungkin untuk kegiatan

prioritas menyangkut Tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak.

Alokasi dan realisasi anggaran untuk program/kegiatan pendukung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20
Realisasi Anggaran Program Penunjang

NO	PROGRAM	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.232.337.865	2.233.659.748	100,06
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.446.400	15.391.451	99,64
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.226.400	5.220.900	99,89
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.079.600	5.068.000	99,77
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.140.400	5.102.551	99,26
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.024.230.872	1.912.419.944	94,48
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.941.489.751	1.830.792.520	94,30
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	77.186.321	76.101.824	98,59
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.554.800	5.525.600	99,47
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	244.346.193	244.114.468	99,91
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.002.000	23.909.503	99,61
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.260.600	22.218.100	99,81
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.655.800	42.652.305	99,99
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.539.300	9.451.560	99,08
	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.888.493	145.883.000	100,00

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.455.200	32.019.060	98,66
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.455.200	32.019.060	98,66
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	57.619.900	55.734.425	96,73
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.762.500	7.755.000	99,90
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.401.600	31.985.941	87,87
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	56.548.000	55.223.769	97,66
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.311.200	52.791.348	99,51
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.234.300	7.154.000	98,89
		Total	2.437.957.565	2.318.060.102	95,08

Sumber: RFK Tahun Anggaran 2024 TW IV Badan Kesbangpol Landak.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa anggaran untuk program/kegiatan penunjang sebesar Rp **2.437.957.565,-** (dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dengan realisasi sebesar Rp **2.318.060.102,-** (dua milyar tiga ratus delapan belas juta enam puluh ribu seratus dua rupiah) atau **95,08%**. Terdapat selisih sebesar Rp 119.897.463,-. Penyumbang terbesar selisih tersebut berasal dari anggaran gaji pegawai yang tidak terserap sebesar Rp. 110.697.231. Namun demikian, ditahun 2024 khususnya bulan Desember, Badan Kesbangpol Landak mengalami kekurangan anggaran untuk pembayaran beban kerja sebesar Rp 20.732.170,00 sehingga dampak yang dihasilkan adalah pemotongan Tunjangan kinerja yang seharusnya dibayarkan 100% sesuai ketentuan Peraturan Bupati Landak.

Realisasi anggaran program/kegiatan penunjang tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023 yaitu 100,06% sedangkan ditahun 2022 sebesar 87,89%.

BAB IV

PENUTUP

Dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak telah terealisasi dengan baik dan sesuai harapan. Berhasilnya pencapaian sasaran tersebut tidak terlepas dari dukungan dan peran serta seluruh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak yang secara sinergis saling membantu serta adanya komitmen dan dorongan dari pimpinan untuk senantiasa memberikan motivasi kepada pegawai dan seluruh komponen terkait dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan bersama.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak tahun 2024, perlu disampaikan beberapa hal berikut:

1. Penghargaan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas partisipasi aktif dan kerjasamanya dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih dalam rangka Menyemarakkan Hari Ulang Tahun Ke – 79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 31 Agustus 2024.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Tahun Anggaran 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak meliputi 4 (empat) sasaran 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan, 40 (empat puluh) sub kegiatan. Pada tahun 2024 capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak sebesar 110,50% dengan tingkat efesiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 1,51 % pada level program.

Penyerapan anggaran belanja program prioritas pada tahun 2024 sebesar Rp35.828.891.043,- (tiga puluh lima miliar delapan ratus dua puluh delapan juta

delapan ratus Sembilan puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah), terealisasi sebesar Rp 35.685.051.246,- (tiga puluh lima miliar enam ratus delapan puluh lima juta lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) atau 99,60%.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan anggaran, penggunaan sarana dan prasarana yang ada yang tersedia.
2. Meningkatkan toleransi, hormat menghormati dan saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat untuk kerukunan dan keutuhan bangsa dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai tokoh agama, pemuda daerah dan lintas suku.
3. Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pencapaian sasaran untuk menekan gesekan-gesekan sosial dan potensi konflik yang mungkin terjadi di kabupaten Landak.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak ini disusun. Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Tahun 2024 ini dapat memberikan informasi tentang kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak.

Ngabang, 25 Februari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Landak,



Samsul Bahri, S. Pd., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19721007 199802 1 004

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran

: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak
: 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya persentase pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan	2 Persentase pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan	87%	97%	111
2	Meningkatnya pemahaman politik terhadap elemen masyarakat	3 Persentase pemahaman terhadap politik, etika dan budaya politik	81%	80%	99
3	Meningkatnya persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan	4 Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan	91%	100%	110
4	Meningkatnya persentase pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	5 Persentase pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	71%	86,34%	122

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2024 : Rp 35.828.891.043
Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2024 : Rp 35.685.051.246

Ngabang, 25 Februari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Landak,



Samsul Bahri, S. Pd., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19721007 199802 1 004

FORMULIR PELAPORAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSANDAN POLITIK KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024

No	URAIAN	BELANJA			Capaian Kinerja		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya persentase pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan						
	Persentase pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan				87	97	111
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	879.474.618	886.596.346	98,41			
	Meningkatnya persentase pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya						
	Jumlah Desa Berkarakter Pancasila				11	12	109
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	879.474.618	886.596.346	98,41			
	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						
	Persentase cakupan keberhasilan kegiatan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			98,41	100%	100%	100
2	Meningkatnya pemahaman politik terhadap elemen masyarakat						
	Persentase pemahaman terhadap politik, etika dan budaya politik				81	80	98,77
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	31.893.342.837	31.500.746.214	99,99			
	Meningkatnya Pemahaman Politik Terhadap Elemen Masyarakat						
	Persentase partai politik penerima bantuan keuangan partai politik dengan kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan Kriteria yang berlaku				100	100	100
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Ketahanan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik	31.893.342.837	31.500.746.214	99,99			
	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						
	Persentase cakupan keberhasilan kegiatan terkait kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Ketahanan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik				100	101	101
3	Meningkatnya persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan						
	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan				91	100	110
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	119.682.346	116.377.600	99,77			
	Meningkatkan Persentase Pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan						
	Persentase Omas dan LSM yang aktif				97	76,62	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	119.682.346	116.377.600	99,77			
	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						
	Persentase cakupan keberhasilan kegiatan terkait Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				100	128,16	#REF!
4	Meningkatnya persentase pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya						
	Persentase pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya				71	65,34	122
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	261.710.700	261.429.500	99,89			
	Meningkatnya persentase pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan						
	Persentase penanganan kasus kerawanan bidang ekonomi, sosial dan budaya				100%	100%	100
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	261.710.700	261.429.500	99,89			
	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						
	Persentase cakupan keberhasilan kegiatan terkait Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				100	100	100
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	335.853.577	329.841.484	97,91	100	100	100
	Meningkatkan kinerja Rencana Aksi Daerah (RAD) penanganan konflik daerah						
	Persentase realisasi kinerja Rencana Aksi Daerah (RAD) penanganan konflik daerah				100	100	100
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	335.853.577	329.841.484	97,91			
	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						
	Persentase cakupan keberhasilan terkait kebijakan teknis dan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial				100	114,4	114,43
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	2.437.957.585	2.319.060.182	95,08			
	Meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan aset						
	Persentase Unit Kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran				98	98	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.446.400	15.391.461	99,54			
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	Jumlah Dokumen Renstra-PD, Renja-PD, RKA-SKPD, LAKIP-PD				3	3	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.924.239.872	1.912.419.944	64,48			
	Terlaksananya penatausahaan keuangan perangkat daerah						
	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah				2	2	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.769.300	14.428.899	97,70			
	Terlaksananya administrasi kepegawaian						
	Laporan administrasi Kepegawaian				1	1	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	244.346.193	244.114.468	99,91			
	Terlaksananya fasilitasi administrasi umum perangkat daerah						
	Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah				6	6	83,33
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.455.200	32.019.090	98,66			
	Terpenuhi BMD penunjang urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah						
	Persentase Pemenuhan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah				1	1	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.164.100	39.740.941	89,99			
	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah						
	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah				100	100	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.646.800	60.946.348	96,84			
	Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah						
	Persentase Operasional dan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah				100	38,46	38,46

Ngabong, 25 Februari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Landak,Samsul Bahri, S. Pd., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19721607 199802 1 004